



Gerakan Identitas Minoritas Masyarakat Ras Papua: Studi Netnografi Gerakan #Papuanlivesmatter

Hilda Indah Bahirah^{1*}, Agrenisa Pratiwi², Andini Lutfiah Putri³, Restu Syahnanda⁴

1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia; hildaib@upnvj.ac.id

2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia; agrenisap@upnvj.ac.id

3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia; andinilp@upnvj.ac.id

4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia; restus@upnvj.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Netnografi,
Rasisme,
Media Sosial,
Masyarakat Papua,
Gerakan#PapuanLivesMatter

Article history:

Received : 2022-08-29

Revised : 2022-11-26

Accepted : 2022-11-29

DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v2i02.6055>

ABSTRACT

Indonesia as it is known is an archipelagic country with various types of tribes, religions, races, regional languages, and cultures that develop in it. The diversity of tribes and various communities raises the problem of racism which is increasingly clouded by the rapid development of information and communication technology. The issue of racism, which is often carried out through social media, has in fact made the mass media open their voices and even more so the media and the community have also encouraged the government to be firm in giving moral and legal sanctions to anyone who commits racism. This study focuses on cases of racism that have long been felt by the Papuan people, which gave rise to the #PapuanLivesMatter movement. Because racial discrimination and racism against indigenous Papuans are still an important urgency which is a source of conflict in tolerance for diversity. So there needs to be synergy from various parties to stop this discriminatory practice. This study uses a netnographic method and data collection is carried out through online observations through hashtags on social media namely Instagram and Twitter as well as library data. This research has results including providing an overview of the uploaded content, namely the selection of visual use in photo, design, or video formats, how to convey messages (captions), and the involvement of activists who take part in the #PapuanLivesMatter Movement action. This study aims to explain that the #PapuanLivesMatter Movement demands justice and equality. Where there is still a lot of discrimination and racism accepted by the Papuan.

ABSTRAK

Indonesia seperti yang diketahui merupakan negara kepulauan dengan berbagai jenis suku, agama, ras, bahasa daerah dan budaya yang berkembang di dalamnya. Keberagaman suku dan masyarakat yang bermacam-macam menimbulkan permasalahan rasisme yang semakin diperkeruh dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Persoalan rasisme yang seringkali dilakukan melalui media sosial nyatanya telah membuat media massa ikut buka suara dan bahkan lebih nyatanya media bersama masyarakat turut menganjurkan agar pemerintah bisa tegas dalam pemberian sanksi moral dan hukum kepada siapapun yang melakukan rasisme. Penelitian ini berfokus pada kasus rasisme yang sudah lama dirasakan oleh masyarakat Papua menimbulkan gerakan #PapuanLivesMatter. Karena diskriminasi Rasial dan Rasisme terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting yang merupakan sumber konflik dalam toleransi kebhinekaan. Maka perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak agar dapat menghentikan praktik diskriminasi ini. Penelitian ini menggunakan metode netnografi dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi online melalui hashtag di media sosial yakni Instagram dan twitter serta data kepustakaan. Penelitian ini memiliki hasil diantaranya memberikan gambaran mengenai konten yang diunggah yaitu pemilihan penggunaan visual dalam format foto, desain atau video, cara penyampaian pesan (caption), dan keterlibatan aktivis yang turut serta dalam aksi Gerakan #PapuanLivesMatter. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Gerakan #PapuanLivesMatter menuntut untuk adanya keadilan dan kesetaraan, dimana masih terlihat banyaknya diskriminasi dan rasisme yang diterima oleh masyarakat ras Papua.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks ini, kontroversi antar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) merupakan isu sensitif yang terjadi di Indonesia. Faktor pemantik terjadinya konflik tersebut adalah adanya rasisme. Rasisme sendiri memiliki arti seperti bentuk kebencian (hatred) yang dicirikan bukan hanya dari rona kulit saja, akan tetapi ada juga dari agama, suku dan budaya. Namun, hal ini terlihat sangat mencolok karena adanya perbedaan yang tidak simetris dan justru berujung timbulnya kerusuhan massal. Apabila membahas mengenai rasisme, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menjadi pusat perhatian dengan isu yang dikabarkan seputar kasus diskriminasi dan rasisme. Di Indonesia, etnis Papua merupakan etnis yang minoritas. Minoritas di sini mengarah pada status sosial dan kekuatan politis.

Dalam masyarakat yang multikultural, persoalan mayoritas dan minoritas akan selalu ada. Contohnya adalah Pulau Cindrawasih. Papua adalah salah satu daerah yang bisa dikatakan sangat mencuri perhatian orang banyak, baik itu dari segi kompleksitas bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Namun, dalam konteks Papua, keberagaman tersebut justru sering menimbulkan masalah tersendiri karena orang Papua masih sering mendapatkan perlakuan rasisme dan diskriminasi dari orang-orang sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya yang mana mereka dihina dengan sebutan 'monyet' (Alam, 2020).

Teknologi berperan besar dalam pengelolaan keberagaman. Misalnya, dampak dari kasus yang terjadi di Surabaya nyatanya semakin diperparah dengan teknologi. Dengan teknologi, masyarakat dapat mengekspresikan berbagai sikapnya dengan mudah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya demonstrasi anti-rasisme yang beredar (Kogoya, 2021). Artinya, kasus yang terjadi pada mahasiswa tidak hanya menyakiti mereka sebagai korban, tetapi juga menyakiti seluruh masyarakat Papua karena mereka merasa diinjak harga diri dan martabatnya sebagai golongan melanesia atau yang biasa dikenal dengan ras negroid. Namun, data YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) menunjukkan bahwa petugas kepolisian masih belum terlihat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Papua khususnya perihal keamanan dan kenyamanan. Salah satu penyebab rasisme ini selalu muncul adalah karena adanya stereotip dari masyarakat non-Papua bahwa orang-orang Papua merupakan orang-orang terbelakang yang tidak penting keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, isu rasisme semakin menyebar baik itu dalam tingkat komunitas organisasi maupun individu maupun tingkat pemerintah, bisnis, institusi pendidikan dan bahkan pada interaksi sehari-hari.

Fenomena rasisme ini muncul pertama kali melalui postingan di media sosial dalam bentuk foto maupun video; konten tersebut kemudian direspon oleh pengguna media tersebut dan mengarah ke arah diskriminasi karena perbedaan warna kulit ras Papua. Dialog media sosial ini merepresentasikan stereotip terhadap suku Papua dan bentuk konstruksi sosial yang sudah dihadirkan melalui wacana mengenai 'ras kulit putih memiliki adab' dan 'ras kulit hitam tak memiliki adab'. Dalam media sosial, kasus diskriminasi tersebut (misal: kasus Surabaya) merupakan kasus sosial yang dapat memancing konflik tersebut dalam waktu tertentu jika terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menyampaikan sebuah informasi ke khalayak ramai. Oleh karena itu, kasus diskriminasi tidak boleh disebarluaskan begitu saja di media sosial sebab akan memicu pemahaman dan respon yang berbeda sesuai sudut pandang yang diambil pembaca (Afriza, 2021).

Diskriminasi rasis seperti Papua bukanlah kasus sederhana jika diletakkan dalam konteks sosio-ekonomi Papua itu sendiri. Fakta memperlihatkan bahwa Papua sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yaitu tambang; namun masyarakat Papua menderita dan tidak mengalami kemajuan ekonomi dan pembangunan secara umum, walau sudah mempunyai status: Otonomi Khusus (Otsus). Artinya, sumbangan sumber daya dibalas dengan perendahan dan diskriminasi.

Kekayaan etnis dan keluhuran budaya Papua dikotori oleh berita diskriminasi rasis (bahkan saat dilanda virus covid-19).

Kasus rasis Papua rupanya melanda belahan dunia lain, yaitu kasus George Floyd. Tewasnya George Floyd oleh polisi Amerika Serikat begitu memprihatinkan dan menimbulkan mayoritas orang khususnya ras kulit hitam untuk melakukan perjuangan. Mereka menuntut balas kematian George Floyd melalui social movement dan kampanye anti rasisme. Gerakan sosial #BlackLivesMatter ini tidak hanya dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat saja, tetapi oleh negara-negara lain (Jerman, Inggris, Australia, New Zealand).

Social movement di atas rupanya terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan atas diskriminasi yang dilakukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya (Elvina, 2020). Karena rasisme terhadap masyarakat Papua semakin mengkhawatirkan, para aktivis dan masyarakat Papua berinisiatif untuk melakukan gerakan #PapuanLivesMatter dengan tujuan untuk menuntut keadilan dan kesetaraan. Media sosial Instagram dan Twitter dianggap paling signifikan dalam rangka melakukan berbagai sosialisasi dan dalam penyebaran informasi dan komunikasi.

Media sosial merupakan media yang sangat strategis dalam gerakan. Diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa di awal tahun 2021 (dimana jumlah tersebut hampir setara dengan jumlah penduduk Indonesia, 274,9 juta jiwa) (Riyanto, 2021). Media sosial sangat multifungsi, bisa diakses dimanapun dan kapanpun, dan menampung ekspresi diri atau perasaan kita melalui emoticon, gambar, video, ataupun teks dan caption. Peran media sosial sangat unggul dan tentunya positif, khususnya komunikasi karena caranya sangat mudah dan biayanya cukup murah dibanding sarana lainnya. Dalam konteks ini, media sosial mampu mengkoneksikan pengguna satu dengan lainnya dan mempengaruhi pengguna sehingga terdoktrin dengan informasi yang belum diketahui kebenarannya (Annisa, 2019).

Gagasan tersebut di atas sejalan dengan penelitian jurnal yang dilakukan oleh Putri et al (2021). Dalam artikel berjudul "Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua)", Putri et al (2021) menjelaskan bahwa diskriminasi rasial dan rasisme terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi urgensi penting dan menjadi sumber konflik dalam toleransi kebhinekaan. Keragaman suku menjadi diskriminasi rasial secara masif oleh masyarakat Indonesia dengan mengabaikan esensi dan makna toleransi kebhinekaan. Akibat sosialnya adalah kerusuhan massal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai tempat.

Rasisme tersebut berasal dari kurangnya rasa menghargai adanya perbedaan serta kurangnya pemahaman makna dari Bhineka Tunggal Ika yang sebenarnya dan tidak diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya diskriminasi dan rasisme terhadap penduduk ras Papua asli. Sedangkan perbedaan dari penelitian Alifia dengan penelitian kelompok kami bahwa terjadinya diskriminasi terhadap kaum minoritas Papua melahirkan sebuah Gerakan #PapuanLivesMatter yang menjadi sebuah pembahasan pada penelitian kami. Hasil penelitian kami dapat menjelaskan bahwa hadirnya Gerakan #PapuanLivesMatter bertujuan untuk menuntut adanya keadilan dan juga tuntutan agar terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang utuh. Tetapi pada nyatanya, pemerintah masih belum mampu menangani kasus rasisme yang terjadi di Papua, serta bentuk respon dari masyarakat dan pemerintah masih dikatakan belum maksimal dalam mengurangi konflik diskriminasi yang dirasakan masyarakat Papua.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi. Objek penelitian ini adalah masyarakat Papua yang terdiskriminasi dan menentang adanya rasisme, sehingga mereka

ikut bergabung dan bergerak dalam aksi kolektif #PapuanLivesMatter untuk menuntut keadilan, sejauh terespresi dalam media sosial. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan observasi online melalui hashtag di media sosial yakni Instagram dan twitter. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meng-copy secara langsung unggahan yang ada di akun Instagram dan Twitter dalam rentang waktu Juni 2020 hingga 29 September 2021. Di Instagram, ditemukan 32.000 unggahan. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang konten yang diunggah dan tentang metode atau cara penyampaian pesan (caption), penggunaan visual dalam format foto, desain atau video, dan keterlibatan aktivis yang turut terlibat dalam aksi Gerakan #PapuanLivesMatter. Seluruh data dianalisa. Hasil analisa menjelaskan dua hal, yaitu (1) bahwa Gerakan #PapuanLivesMatter menuntut untuk adanya keadilan dan kesetaraan, dan (2) bahwa diskriminasi dan rasisme masih diterima oleh masyarakat ras Papua.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Gerakan #PapuanLivesMatter Merupakan Respon dari Permasalahan Isu Rasisme di Papua

Tagar #PapuanLivesMatter hadir di media sosial menyusul tagar #Blacklivesmatter yang hadir sebagai bentuk protes sejumlah warga AS atas kasus tewasnya George Floyd di Amerika Serikat. Veronica Koman merupakan salah satu aktivis dan pengacara yang banyak mengurus kasus HAM di Papua yang pertama kali menghubungkan #Blacklivesmatter dengan kasus-kasus yang terdapat di Papua. Ia menuliskan sejumlah tulisan dengan tagar #Papuanlivesmatter (Wijaya, 2020). Setelah ramai perbincangan mengenai gerakan #BlackLivesMatter di Amerika Serikat, gerakan Papuan lives matter ini muncul dan memicu kembali permasalahan isu rasisme di Papua. Hal ini juga bertepatan dengan pengadilan 7 tapol Papua terkait tuduhan makar pada saat aksi yang menentang rasisme dan pengepungan asrama mahasiswa Papua pada tahun 2019 lalu.

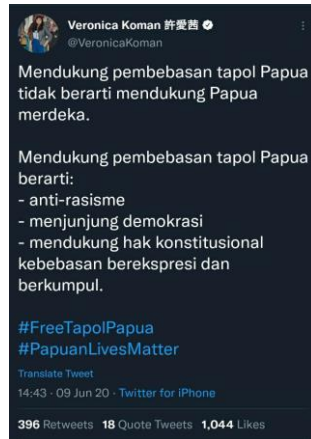
Gerakan #PapuanLivesMatter pada dasarnya merupakan suatu tuntutan terhadap ketidakadilan, tindakan rasisme, dan diskriminasi yang selama ini telah diterima oleh masyarakat Papua. Kondisi tersebut terbentang dengan opini publik bahwa masyarakat Papua memiliki kecenderungan yang berpikiran lemah; secara intelektual terbelakang, dan menjalani gaya hidup primitif di tengah kehidupan perkotaan. Sementara itu, diskriminasi rasial dan rasisme terhadap masyarakat asli Papua merupakan sumber potensial bagi konflik dalam masyarakat yang berkebhinekaan. Perbedaan rasial tersebut pada akhirnya menjadi diskriminasi rasial secara masif yang tanpa disadari diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman akan makna toleransi kebhinekaan, sehingga menimbulkan terjadinya kerusuhan massal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai tempat.

Gerakan ini juga menuntut perihal pembebasan 7 tahanan politik yang ditangkap pada saat aksi demonstrasi anti-rasisme pada tahun 2019 dan menuntut pelaku rasisme untuk mendapatkan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Pada saat itu, sidang yang dilakukan kepada tujuh tahanan politik di Papua ternyata memicu afeksi dari berbagai organisasi internasional seperti The Global Secretariat International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL). Banyak sekali desakan baik itu dari perorangan ataupun organisasi Indonesia dan negara-negara lain perihal harus dibebaskannya 7 tahanan tersebut. Namun, yang terjadi justru hakim tetap menetapkan orang Papua ini bersalah dan jatuhnya adalah perbuatan kriminal. Hal ini tentu tidak adil karena hukum yang dijatuhkan seperti tidak sesuai dengan kesalahannya sebab yang mereka lakukan hanya protes damai pada umumnya.

Sejatinnya seperti yang kita ketahui, dalam UUD 1945 pun telah dijelaskan bahwa siapapun bebas mengekspresikan pendapatnya baik itu dalam hal Hak Asasi Manusia ataupun politik karena semua itu telah tercantum pada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (Amali, 2020). Tetapi lagi-lagi hukum bertindak dengan tidak bisa ditebak karena membelenggu kebebasan berpendapat warganya, negara dalam hal ini malah menjerat dan mengatakan bahwa orang Papua ini terlibat makar. Yang pada akhirnya menggiring opini publik perihal sebenarnya negara ini hanya takut masyarakat Papua akan sadar bahwa mereka sedang diperlakukan tidak adil dan haknya sebagai warga belum terpenuhi atau dari pihak negara sendiri memang menganggap bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap minoritas merupakan suatu hal sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut tujuh tapol ini harus mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Balik Papan atas tuduhan makar yang padahal mereka melakukan gerakan tersebut untuk membela rasnya yang seringkali terkena kasus rasisme. Buruknya bahkan mereka terancam hingga belasan tahun penjara, hadirnya gerakan #PapuanLivesMatters dan banyaknya dukungan dalam rangka pembebasan tujuh tahanan politik berhasil membuat hakim mencari jalan tengah dengan memvonis ringan, yang pada awalnya divonis 5-17 tahun menjadi 10-11 bulan.

Tabel 1. Pengolahan Data #PapuanLivesMatter di Media Sosial

NO	NAMA AKUN	ISI POSTINGAN	PENJELASAN POSTINGAN
1.	Twitter: @VeronicaKoman Dengan followers 139 Ribu		<p>Dalam tweet yang diunggah oleh aktivis Veronica Koman di dalam akun nya pada tanggal 8 Juli 2020 yang mendapatkan Likes 497, Reetweets 273, dan Comment 35, menunjukkan bahwa ia mendukung dan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung gerakan #PapuanLivesMatter dan juga gerakan #FreeTapolPapua yang bertujuan untuk menuntut kebebasan 7 tahanan politik Papua yang dianggap makar pada saat menentang rasisme dan aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua pada tahun 2019 lalu.</p> <p>Selanjutnya pada tweet an yang diunggah pada tanggal 9 Juli 2020 yang mendapat likes 1044, Retweets 396, dan Quote Tweets 18, ia menjelaskan bahwa dukungan mengenai pembebasan tapol Papua bukan merupakan dukungan atas Papua merdeka. Karena dukungan pembebasan Papua merupakan bentuk dari anti-rasisme, menjunjung demokrasi, dan mendukung adanya hak konstitusional kebebasan berekspresi dan berkumpul.</p>



2. Instagram:
@8ehradioitb
b
Dengan
followers
7.190



Postingan yang dibuat oleh @8ehradioitb dengan likes sebanyak 131 menunjukkan bahwa KM ITB dan BEM UNPAD mengeluarkan pernyataan sikap yang menuntut pemerintah untuk menghilangkan rasisme dan memberikan keadilan atas Papua. Mereka mengatakan bahwa di tengah segala bentuk konflik yang terjadi di Papua saat ini, dan menilik kembali rekam jejak sejarah panjang di Papua, sudah sepatutnya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia dan pemaknaan terhadap Pancasila perlu dijalankan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Kondisi perbedaan dan keberagaman jangan sampai menciptakan cara pandang tersendiri yang berdampak pada tidak adanya penghargaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam kondisi berbangsa dan bernegara. Jangan sampai pemerintah pun salah bertindak dalam upaya menciptakan suasana kondusif atas konflik yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

3. Instagram:
@bem_si
Dengan
followers
183 Ribu



Postingan yang dibuat oleh @bem_si pada 11 Juni 2020 dengan jumlah likes 5.018 merupakan pernyataan sikap dari BEM Seluruh Indonesia mengenai penangkapan terhadap 7 tahanan politik yang merupakan rekan-rekan mahasiswa dari Papua, dimana mereka dituduh makar karena melakukan aksi penyampaian pendapat di Istana Negara. Postingan ini menjelaskan bahwa BEM SI memberikan dukungan solidaritas untuk 7 Tapol Papua dengan bentuk pengawalan terhadap kasus ini. Selain itu, meminta untuk mengusut kegagalan dari proses penangkapan hingga hukuman penjara. BEM SI juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan keadilan kepada 7 Tapol Papua. BEM SI memberikan pernyataan bahwa tidak boleh ada diskriminasi di depan hukum, karena semua berada di entitas yang sama.

4. Instagram:
@thealphasc
ommunity
Dengan
followers
171



Postingan yang di upload oleh @thealphasccommunity dengan jumlah likes 392. Postingan ini menjelaskan bahwa masyarakat Papua masih banyak mendapatkan diskriminasi atau rasisme dari masyarakat lain atas perbedaan yang dimiliki. Hal ini membuat situasi dan kondisi Papua semakin tersingkirkan, maka dari itu melalui postingan ini bertujuan untuk menyebarkan bahwa kami Papua, kami Indonesia tanpa harus membedakan suku satu dengan lain. Dimana tiap individu berhak mendapatkan hak asasi manusia serta keadilan secara penuh dan merata.

5. Youtube:
BBC News
Indonesia
Dengan
Subscriber
944 Ribu



Dalam video BBC Indonesia tahun 2019 yang berjudul "Rasisme Papua: Tolong Hormai Kami Sebagai Manusia", diketahui bahwa dalam melihat konflik yang terjadi di Surabaya masyarakat Papua merasa kecewa dan merasa terpukul dengan sebutan "Monyet". Mereka ingin dihormati sebagai manusia, dan tidak dihina dengan perkataan yang menyakiti hati mereka.

Mereka mengatakan bahwa jika Indonesia ingin maju, maka jangan ada lagi yang namanya rasisme, penindasan, dan diskriminasi yang selalu terjadi pada masyarakat Papua. Mereka berharap bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dll. Hingga rentan waktu 29 September 2021 tercatat terdapat 1.6 juta view, 38.000 like, dan 10.000 komen. Hal tersebut menandakan bahwa video yang diunggah berhasil memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat luas terhadap permasalahan rasisme yang masih diterima oleh masyarakat Papua

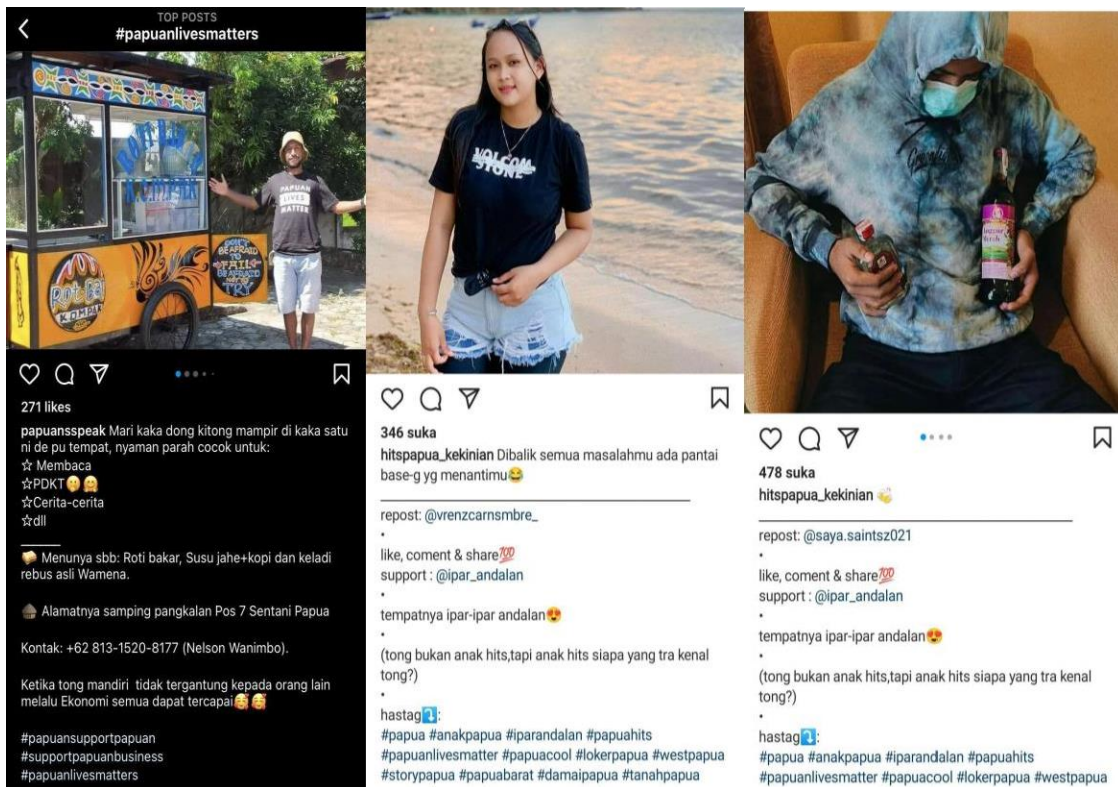
Namun, dalam penelitian ini kami juga menemukan bahwa beberapa unggahan yang ada di media sosial tidak sesuai dengan makna dari gerakan #PapuanLivesMatter (Gambar 1).

3.2. Pemerintah Memperpanjang Otonomi Khusus Papua

Dalam permasalahan mengenai isu rasisme di Papua, pemerintah kembali memperpanjang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Melalui Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Indonesia mengajukan perpanjangan anggaran dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi wilayah Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Dana anggaran untuk Otsus sendiri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 234 triliun rupiah yang merupakan jumlah dari lipatan dana di tahun 2002 sebanyak Rp. 101,2 triliun rupiah (Tirto.ID, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah harus terus berjanji untuk mencapai pembangunan dan memiliki tujuan untuk melindungi adanya kesenjangan di Provinsi Papua. Namun, pada kenyataannya dengan adanya otonomi khusus-pun kesenjangan

masih tetap saja terjadi kepada masyarakat Papua. Hal tersebut dikarenakan permasalahan rasisme dan diskriminatif selalu terjadi secara terus berulang, contohnya seperti yang menimpa warga Papua di Surabaya tepatnya pada Asrama Mahasiswa Papua tahun 2019 lalu, dimana mereka dihina oleh kepolisian dengan kalimat yang mendiskriminasi seperti “kerat”, “bau” dan “anjing” karena mereka dituduh menurunkan bendera Indonesia ke saluran got yang padahal semua itu tidak terbukti. Selain itu menurut Natalius Pigai, kasus rasisme yang seringkali terjadi ini bukan hanya semata-mata berkaitan dengan diri masyarakat Papua itu sendiri, tetapi sudah terjadi dalam konteks yang lebih luas melalui media sosial. Natalius melalui akun Twitternya mengatakan bahwa rasisme yang rasakan orang ras kulit hitam dan terjadi lebih dari 50 tahun (Marten, 2016).

Gambar 1. Kampanye tidak sesuai dengan makna dari gerakan #PapuanLivesMatter



Selama 20 Tahun Otsus di wilayah Papua pada kenyataannya memang tidak secara maksimum dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua, lepasnya dari ikatan tidak adanya hukum atau pasal yang mengatur tentang terbatasnya UU Otsus Papua. Hal ini dibuktikan dari besarnya dana anggaran otsus yang mencapai 2 triliun dan berasal dari sumber dari 2% DAU Nasional, akan tetapi pemerintah masih belum mampu mensejahterakan warga Papua dimana tingkat kemiskinan di sana terus semakin meningkat (Marten, 2016). Dalam konteks ini, pemerintah sebaiknya tidak memaksa untuk memperpanjang otonomi khusus, namun juga harus lebih serius perihal memberhentikan tentang pengulangan kasus rasisme dan diskriminasi terhadap ras Papua. Hal ini dikarenakan, impian masyarakat Papua bukan perihal uang melainkan harkat dan martabat Ras Papua yang dihargai sebagaimana orang pada umumnya. Selain dari itu, diharapkan masyarakat luas tidak mengorbankan Papua sebagai objek dan buronan yang selalu dikejar-kejar dan dijadikan bahan sebuah candaan tentang ciri khas Papua yang memiliki warna kulit yang gelap dan rambut keriting (Marten, 2016).

3.3. Isu Rasisme Papua Merupakan Masalah yang Tidak terselesaikan.

Peneliti menemukan bahwa sampai saat ini diskriminasi rasial yang dialami oleh masyarakat Papua adalah permasalahan yang masih belum selesai di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia masih mengabaikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan konflik yang terjadi di beberapa daerah, dinamika konflik di Papua memiliki akar yang sangat kompleks, karena permasalahan yang terjadi tidak mengarah kepada satu masalah. Sehingga, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua membutuhkan proses yang sangat panjang dan metode-metode penanganan yang lebih matang. Konflik yang terjadi di Papua memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal itu dikarenakan penyebabnya yang tidak sama, sifat dan karakter yang berbeda juga akan menghasilkan penyelesaian atau resolusi yang berbeda. Penyebab konflik yang timbul dari masalah politik dan ekonomi sangat berbeda dengan yang timbul dari kebebasan berpendapat atau kebebasan mengakses informasi (Hasibuan, 2022). Tindakan rasisme dan diskriminasi ini telah mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan rasisme ini semakin terlihat saat adanya aktivis yang ditangkap karena ikut mengikuti aksi anti-rasisme. Oleh karena itu, dalam pemberitaan yang ada di dalam konten dengan #PapuanLivesMatter, terbentuk sebuah pandangan bahwa masyarakat Papua tidak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat mereka atas diskriminasi rasial yang terjadi. Kenyataan itu kemudian disebarluaskan oleh gerakan #PapuanLivesMatter yang beredar di media sosial Instagram dan Twitter untuk menggiring masyarakat luas agar percaya bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua adalah hal yang wajar untuk dilakukan oleh mereka dalam menuntut adanya persamaan hak yang selama ini mereka tidak dapat merasakan (Baware et al., 2021).

Pada permasalahan ini, pemerintah menguatkan identitas nasional melalui cara menciptakan mitos-mitos, seperti: Proyek Pembangunan, Trans-Papua, Otonomi Khusus, Militerisasi, dan Pemekaran Baru. Sementara itu, dalam ranah pendidikan, pemerintah menyatakan alokasi pembiayaan yang bersumber dari dana Otsus untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pemerintah juga menciptakan sejumlah slogan, seperti: NKRI Harga Mati, Papua Bagian dari NKRI, Pancasila Sudah Final, Tidak Bisa Diganggu Gugat. Namun, usaha tersebut mengalihkan dan menutupi masalah sosial di Papua. Di sini, pemerintah menciptakan tawaran dan kepercayaan seakan-akan mengakhiri akan persoalan (Kogoya & Jacky, 2021).

Sedangkan, bagi kelompok yang dianggap oposisionis akan dicap menjadi KKSB/KKB/Terroris dan "eparatis. Padahal nyatanya, mereka merupakan intensitas dalam melakukan kegagalan kepada pemerintah, terutama Organisasi Papua Merdeka (OPM), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Singkatnya, mereka tidak setuju dengan kekuasaan penuh Jakarta dan ingin lepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan pola resisten dalam pertarungan ideologi (*struggle ideology*) dari kelompok resistensi kedaerahaan Selama ini, gerakan protes dari masyarakat Papua selalu dikaitkan oleh tindakan separatisme. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Papua memiliki tuntutan kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap aksi atau diskusi yang berkaitan mengenai isu rasisme di Papua, selalu menghadapi kendala.

Peneliti mengamati bahwa gerakan #PapuanLivesMatter yang beredar di media sosial ini menggambarkan bagaimana masyarakat Papua mengalami diskriminasi rasial dan tujuan dari aktivis Papua melakukan aksi anti-rasisme tersebut. Narasi berita memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua mengalami kendala dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai tindakan

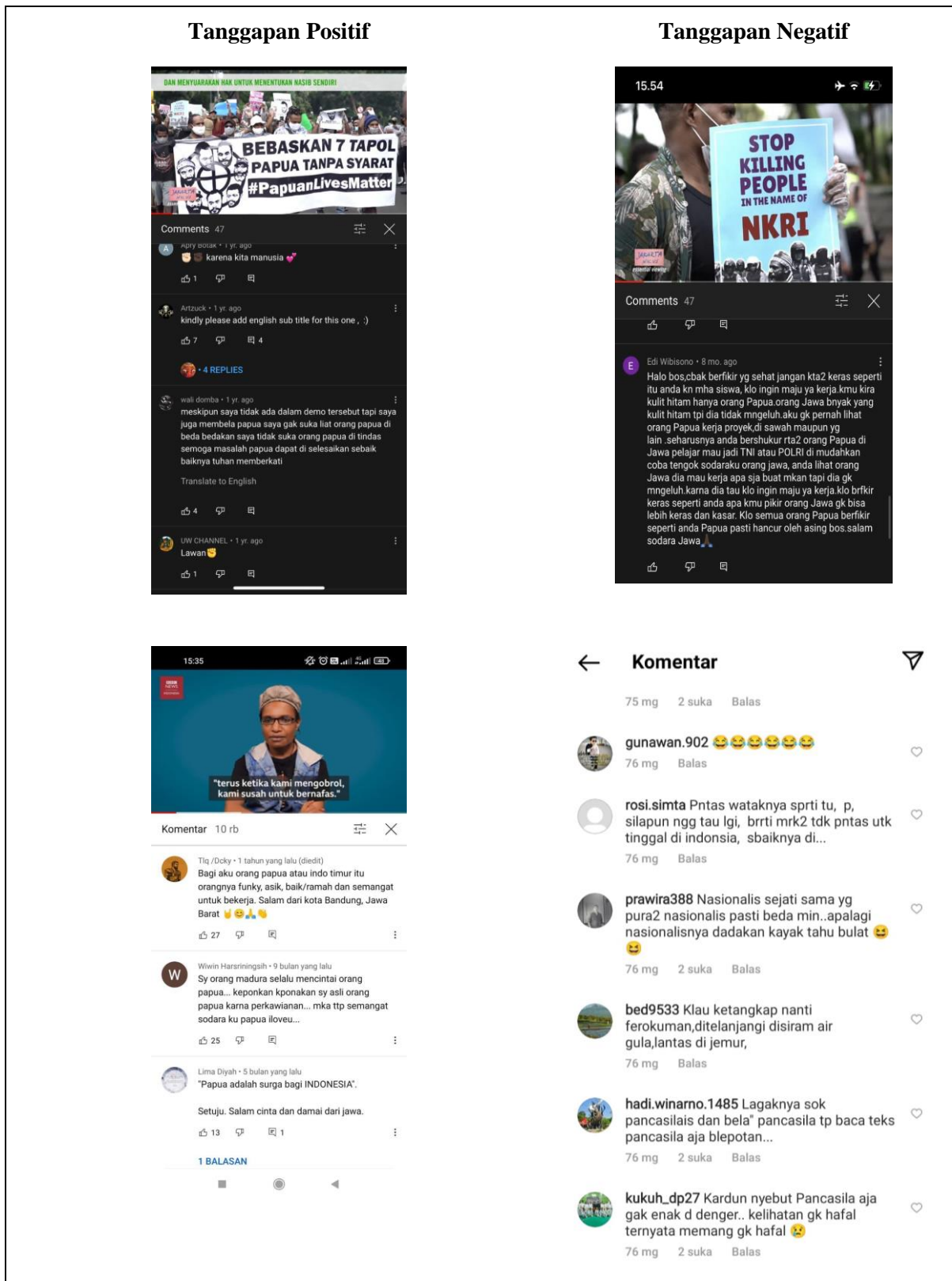
diskriminasi dari pemerintah. Dengan adanya #PapuanLivesMatter yang beredar di media sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Karena seperti yang kita ketahui salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi adalah kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat.

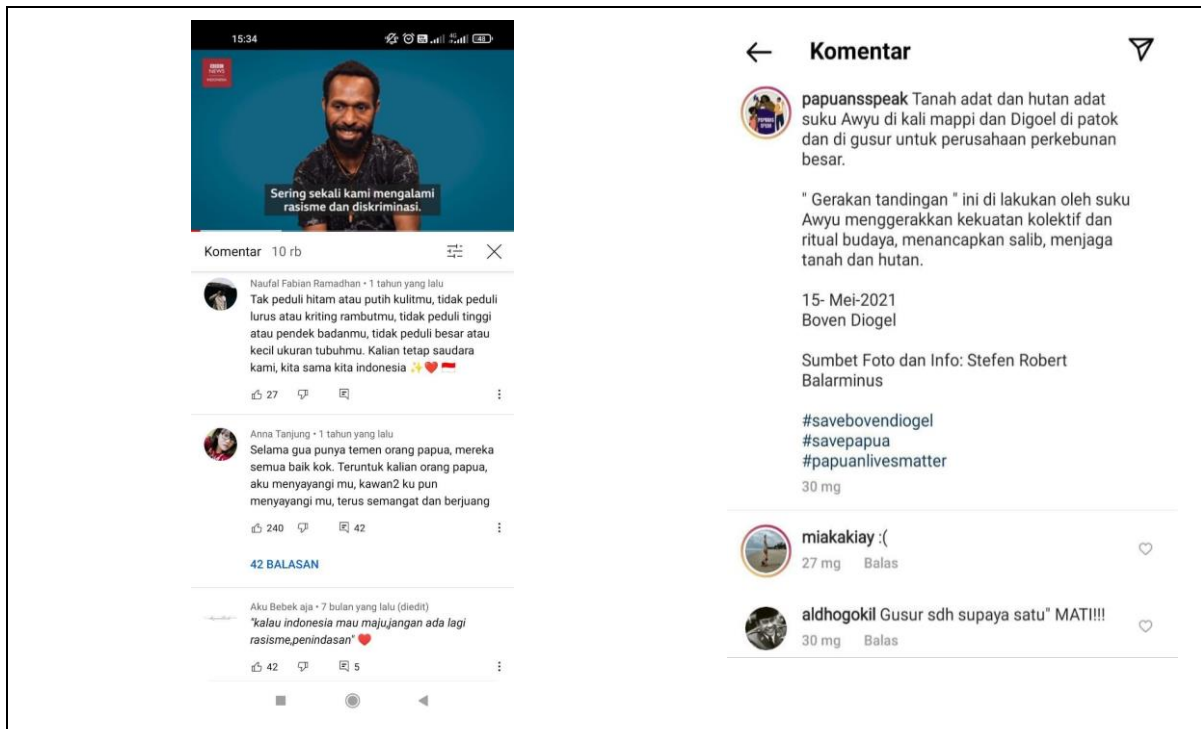
Selain itu, gerakan #PapuanLivesMatter yang masih kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih dirasakan oleh masyarakat Papua. Kecilnya dukungan disebabkan karena pemerintah memblokir akses dan jaringan media sosial di Papua. Akibatnya, informasi tidak teramplifikasi dan tidak terlihat oleh masyarakat luas. Masyarakat Papua tidak mendapat ruang yang besar untuk menuntut haknya. Ironinya, pada saat menyatakan hak kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat, masyarakat Papua selalu mendapat kriminalisasi, atau bahkan menjadi tahanan politik. Veronika Kusumaryati, Peneliti Papua dari Georgetown University, Amerika Serikat menyatakan kasus rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP) selalu terjadi secara berulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi rasial terhadap OAP adalah permasalahan struktural dan sistemik yang melibatkan kebudayaan dan kepercayaan yang mengakar. Maka dari itu, Veronika menekankan bahwa rasisme bukanlah permasalahan individual tetapi merupakan permasalahan yang berakar pada keyakinan, perilaku, dan sistem sehari-hari masyarakat, dimana mereka selalu menganggap rendah ras lainnya.

Kelemahan proses negosiasi Papua adalah tidak adanya pihak yang netral untuk memajukan proses negosiasi, sehingga sangat sulit untuk mencapai kesepakatan dengan suara bulat karena semua pihak yang bernegosiasi memiliki kepentingannya masing-masing dan setiap pihak bisa saja membatalkan proses negosiasi secara sepihak. Namun, jika negosiasi dianggap gagal atau menemui jalan buntu, maka peran pihak ketiga dapat berfungsi sebagai fasilitator atau mediator antara pihak-pihak yang berkonflik. Untuk itu, dalam konteks konflik antara Papua dan pemerintah Indonesia, penyelesaian konflik yang paling relevan adalah melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga. Karena konflik antara pemerintah pusat dan Papua bukan hanya konflik sosial, tetapi juga konflik politik dengan intensitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik yang muncul.

Dalam menghasilkan perjanjian politik atau kesepakatan bersama dapat diambil dari forum yang dibuat bersama dengan serius secara formal, selanjutnya melaksanakan proses penandatanganan dari masing-masing pihak yang disaksikan oleh pihak ketiga. Perjanjian politik tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu konsensus dan bisa bekerjasama dalam menyelesaikan setiap sumber-sumber konflik yang terjadi. (Hasibuan, 2022).

Gambar 2. Tanggapan Positif dan Negatif Masyarakat Dalam Media Sosial





Salah satu peristiwa yang ada di Surabaya, Malang, dan Semarang adalah bentuk nyata dari rasisme dan diskriminasi yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang diwujudkan dalam aksi unjuk rasa tanpa kekerasan dari masyarakat Papua, termasuk di Manokwari dan Sorong. Tindakan tersebut harus dihentikan dan ditangani sesuai dengan hukum untuk memastikan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, dan untuk memastikan adanya jaminan hak asasi manusia orang Papua, persamaan di depan hukum, serta adanya persamaan dan keadilan untuk semua masyarakat Papua.

Perlakuan diskriminatif, rasisme, kekerasan dan cara-cara represif terhadap masyarakat dan mahasiswa Papua, termasuk tindakan pengamanan tertutup, hanya akan memperburuk penyelesaian masalah Papua dan berujung pada eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahan harus terbuka dan mengeluarkan kebijakan yang murni, tidak represif dan meminimalkan keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua. Serta memulihkan kembali ruang tertindas hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi politik di Papua, termasuk perwakilan mahasiswa dari masyarakat Papua yang menyatakan keinginan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia (Walhi, n.d.).

3.4. Dampak Berkelanjutan Dari Diskriminasi Terhadap Ras Papua

Banyaknya cacian dan kalimat sarkasme yang didapatkan masyarakat Papua memberikan efek kesenjangan antar ras, suku dan budaya. Mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan adalah bentuk dari ketidakberhargaan diri ras Papua atas perbedaan warna kulit. Mereka percaya dan yakin bahwa diskriminasi ini juga memberikan ruang yang sempit dalam kebebasan serta keterlibatan mereka dalam mengambil sebuah keputusan, seperti minimnya kesempatan dalam memberikan pendapat, terabaikan cerminan martabat kolektif melalui hak-hak budaya, dan dianggap sebagai pemikir kolot oleh masyarakat lain.

Secara geografis, Papua juga berada di wilayah terpencil. Keterpencilan ini membuat orang Papua yang datang ke wilayah lain, selalu memisahkan diri. Tindakan itu dilakukan karena mereka merasa terancam atas perlakuan yang didapatkan (King Jr, 2008). Kondisi ini diverifikasi oleh peristiwa sosial. Kejadian Surabaya, misalnya, mengancam ruang keamanan wilayah Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua melakukan aksi demonstrasi damai sebagai ekspresi kekecewaan dan kekesalan yang sudah lama terpendam. Segala keluh kesah ini dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya adalah (1) penciptaan rasa saling menghargai dan menghormati berbagai macam perbedaan di dalam sosial budaya, dan (2) penyelesaian problematik pelanggaran HAM di Papua dengan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kejujuran.

Singkatnya, diskriminasi terhadap Papua memang menjadi topik yang urgensi dan harus cepat ditangani dengan baik; hal ini mencakup nilai dari harga diri sebuah ras, suku, budaya bahkan wilayah. Jika permasalahan ini tak kunjung selesai, akan terjadi sebuah keputusan bahwa masyarakat Papua akan menyatakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwakilan dari masyarakat Papua yang mengekspresikan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Kemungkinan ini sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya Persatuan Indonesia (Katharina, 2019).

4. Conclusion

Penggunaan media sosial Instagram, Twitter atau YouTube adalah sarana yang tepat digunakan dalam melakukan aksi gerakan #PapuanLivesMatter dalam rangka menuntut adanya keadilan dan kesetaraan. Hal ini dikarenakan media sosial Instagram, Twitter atau youtube dinilai lebih mudah dijangkau oleh semua pengguna di penjuru dunia sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat tersebar dan dapat diterima secara luas. Dari adanya konten-konten yang memuat mengenai gerakan #PapuanLivesMatter, terdapat tanggapan positif dan negatif dari masyarakat luas. Hal tersebut menjadi bukti pandangan masyarakat luas terhadap ras Papua masih belum membaik. Masih adanya komentar negatif di media sosial merupakan bentuk dari kurangnya respon masyarakat Indonesia yang baik terhadap banyaknya perbedaan. Warna kulit yang berbeda masih dianggap asing oleh masyarakat luas, padahal perbedaan tersebut merupakan ciri khas dan keunikan dari masing-masing suku, budaya dan ras yang ada di Indonesia. Kebebasan media sosial yang tak terkontrol dalam mengomentari atau mengupload segala informasi menjadi ke ranah rasisme merupakan salah satu bentuk dari kurangnya peran pemerintah yang belum maksimal dalam menangani kasus kekerasan di dunia maya terhadap ras Papua. Jika kasus rasisme ini ingin berkurang, peran masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan rasa toleransi dan keadilan sehingga diskriminasi ras Papua hilang dan kesejahteraan masyarakat mendapat prioritas pembangunan yang berkeadilan sosial.

Penelitian ini membuka penelitian baru dan memberikan rekomendasi. *Pertama*, kajian tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam fenomena 'diam' masyarakat Papua terhadap tindakan rasis dan ketidakadilan yang dialami. Alasannya, masyarakat Papua selalu diminta untuk 'diam' demi persatuan dan kerukunan, mereka. Karena 'diam'-nya, tindakan rasisme dan stigma terhadap masyarakat Papua berujung pada dehumanisasi yang melanggengkan sikap negatif dan kebencian. *Kedua*, pentingnya kajian tentang praktik peradilan terhadap kasus diskriminasi dan tindakan rasis. Fenomena tagar #PapuanLivesMatter telah menyadarkan masyarakat Indonesia tentang ketidakadilan dan rasisme yang sudah lama dialami masyarakat Papua. Namun, seringkali pengulangan tindakan rasis terhadap masyarakat Papua mengindikasikan lemahnya proses peradilan sehingga (1) stereotip Papua tidak berubah, (2) hak masyarakat Papua tidak terpenuhi, (3) HAM dilanggar di tanah Papua tetapi tidak ada proses hukum secara jelas.

REFERENCES

- Altizer, Thomas, J. J. (1962) "Mircea Eliade and the recovery of the Sacred". Penn State University Press Journal, *The Christian Scholar*, Vol. 45, No. 4 Winter.
- CNN Indonesia. 2022. Media Asing Soroti Kasus Promosi Holywings Pakai Nama Muhammad-Maria. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629180938-106-815183/media-asing-soroti-kasus-promosi-holywings-pakai-nama-muhammad-maria>. (Diakses pada 29 Juni 2022)
- Eliade, Mircea. (1958). *Birth and Rebirth*, trans. Willard R. Trask. New York: Harper & Brothers.
- _____. (1958). *Patterns In Comparative Religion*, trans. Rosemary Sheed. New York: Sheed & Ward.
- _____. (1956). *The Forge and the Crucible*, trans. Stephen Corrin. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- _____. (1958) *Yoga: Immortality and Freedom*, trans. Willard R. Trask. New York: Pantheon Boks. Bollingen.
- _____. (1959) *Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return*, trans. Willard R. Trask. New York: Harper Torchbooks.
- _____. (1956) *The Sacred and The Profane: the Nature of Primitive Religion*, trans. Willard R. Trask. New York: Harcourt, Brace & World, inc.
- Kitagawa, Joseph M., Wendy D. O'Flaherty, Frank E. Reynolds. (1986). Mircea Eliade (1907-86). *The University of Chicago Press Journal, History of Religions*, Vol. 26, No. 1 Aug, 1986.
- Sindhunata. 2019. Ambyar. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/20/ambyar> (Diakses pada 20 November 2019)